**IMPIAN TERWUJUDNYA IBU KOTA BARU YANG IDEAL**

Kabar bahwa pemerintah telah berencana untuk memindahkan ibu kota baru telah diterima dari sejumlah kalangan masyarakat. Sebagian mereka berharap dengan dipindahkan ibu kota baru dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan menyelesaikan problem-problem ibu kota seperti menangani kemacetan lalu lintas, banjir dan meningkatnya urbanisasi yang belum usai ditangani sampai saat ini. Presiden Jokowi pun berjanji akan menyampaikan secara resmi mengenai pemindahan ibu kota baru pada Agustus 2019 mendatang rencananya akan dialokasikan di satu wilayah kepulauan kalimantan yang terlansir dalam harian Kompas.

Wacana mengenai pencarian ibu kota baru Indonesia juga menuai komentar dari beberapa belah pihak. Seperti, pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga kepada VOA mengatakan Jakarta masih layak menjadi ibu kota dengan alasan investasi besar-besaran yang telah dilakukan, bahkan untuk beberapa ke depan. Menurutnya, pemerintah provinsi DKI Jakarta harus memusatkan perhatian menyelesaikan persoalan-persoalan yang melilit ibu kota. Kalau pun perpindahan ibu kota tetap dilaksanakan, tentunya perlu dipertimbangkan kembali terkait dengan tingkat kerawanan bencana dan persiapan infrastruktur, tambahnya.

Pemerintah juga tidak ingin tergesa-gesa melakukan pembangunan tanpa persiapan yang lebih matang. Seperti yang di ungkapan presiden jokowi saat diwawancarai mengenai perpindahan ibu kota baru.“Saya kira kalau sudah rampung, sudah tuntas, detailnya sudah dipaparkan, untuk kajian kebencanaan seperti apa, kajian mengenai air, kajian mengenai keekonomian, kajian mengenai demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya karena memang harus komplit,” jelas Presiden Jokowi.

Harapan rencana relokasi pembangunan ini diharapkan Jakarta akan menjadi ibu kota komersial ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sedangkan ibu kota baru menjadi ibu kota admisnitratif Indonesia. Pemerintah pun sudah memperhitungkan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru. Dengan luas pusat pemerintahan 2.000 hektar dan luas kota keseluruhan 40.000 hektar, pemerintah telah menganggarkan sebesar 33 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 446 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrasrtuktur dasar kota dan berbagai kelengkapannya. Bambang mengatakan dengan diputuskannya lokasi ibu kota baru tahun ini, maka proses pembangunan awal yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar bisa dimulai pada 2020 mendatang. "Kajian akan difinalkan tahun ini, keputusan lokasi bisa dilakukan di tahun ini sehingga 2020 bisa dipersiapkan pembangunan maupun infrastruktur dasar," ujar dia.

Beberapa alasan pro kontra terkait pemindahan ibukota, akhirnya saya meninjau ulang keuntungan-keuntungan yang akan membawa perubahan Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi 4.0. Indonesia punya peluang untuk menerapkan *split capital* dimana dua wilayah berfungsi sebagai ibu kota. Beberapa negara maju yang berhasil menerapkan konsep serupa negara Belanda ( Amsterdam dan Den Haag), Israel (Jerusalem dan Tel Aviv), dan negara maju lainnya. Dengan diterapkan dua wilayah ibukota akan memberikan banyak manfaat untuk negara Indonesia. Jakarta yang merupakan ibukota negara Indonesia kini dianggap sudah tak ramah lingkungan. Hampir setiap tahun Jakarta dipenuhi oleh pendatang baru guna mengadu nasib di ibukota. Pembangunan infrastruktur ibu kota dengan kenaikan pendapatan semakin menggiurkan penduduk desa pindah dan tinggal di ibu kota. Jakarta yang awalnya diprediksi menampung penduduk sekitar 600 jiwa, kini sudah mencapai 10 juta jiwa lebih. Pembangunan di Indonesia belum dikatakan merata, dikarenakan masih ada tumpang tindih antar propinsi terutama wilayah Timur yang dianggap masih tertiggal jauh dari perindustrian. Pembagian wilayah ibu kota memberikan peluang untuk pemerataan pembangunan, meningkatkan perindustrian di wilayah-wilayah yang masih tertinggal. Selain itu, pembagian pembangunan infrastruktur membawa kota Jakarta lebih kondusif dan efisien. Tujuan dari *split capital* tak lain untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yakni mensejahterakan rakyat Indonesia. Dengan adanya koneksi antara pemerintah dan masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama akan semakin cepat terealisasikan. Semoga impian dan harapan kita semua dapat terwujud kedepannya untuk menembus negara industri yang mampu bersaing dalam perekonomian 4.0.